

**IMPLEMENTASI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* BAGI ANGGOTA
MILITER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Bakamla)**

Disusun Oleh:

**TIO
DEWANGGA G
E1A015185**

ABSTRAK

Praktik korupsi di Indonesia saan ini sudah hamper terjadi di berbagai lini pemerintahan dan institusi. Tentara Nasioanal Indonesia (TNI) pun tidak luput dari praktik korupsi yang menurut pandangan masyarakat institusi tersebut merupakan yang paling bersih dari praktik korupsi. Konstitusi Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Asas *Equality Before The Law* bagi anggota militer dalam kasus Tindak Pidana Korupsi BAKAMLA Laksamana Pertama Bambang Udoyo dan kendala penyidik dalam mengungkap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Asas *Equality Before The Law* bagi anggota militer dalam kasus Tindak Pidana Korupsi BAKAMLA Laksamana Pertama Bambang Udoyo sudah diwujudkan melalui peraturan yang berlaku di Indonesia baik dalakonsitusi maupun peraturan lain dibawahnya. Institusi TNI berkordinasi dengan lembaga yang bersifat sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : *Equality before the law*, Anggota militer, Komisi Pemberantasan Korupsi

**THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE
THE LAW FOR MILITARY PERSONNEL IN CORRUPTION CASE
(Case Study of Indonesian Maritime Security Agency)**

By:

**TIO DEWANGGA G
E1A015185**

ABSTRACT

Corruption practices in Indonesia are now almost occurred in various lines of government and institutions. The Indonesian National Armed Force (TNI) is also not immune from corruption practices which in the view of the community the institution is the cleanest institution from corruption practices. This research has the purpose to determine the Implementation of the Principal of Equality Before the Law for military personnel in the corruption case of Indonesian Maritime Security Agency Rear Admiral Bambang Udoyo and the obstacles of investigators in disclosing the case. The research method used is sociological juridical with descriptive research specifications. The data used in this research are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the informants, while secondary data were obtained from literature studies. The data that has been obtained is then processed and analyzed using qualitative methods and presented in the form of systematic descriptions. The results showed that the Implementation of the Principle of Equality Before the Law for military personnel in the corruption case of Indonesian Maritime Security Agency Rear Admiral Bambang Udoyo had been realized through applicable regulations in Indonesia both in the constitution and other regulations below it. The Indonesian National Armed Force has coordinated with civil institutions in accordance with applicable regulations in the disclosure of corruption case.

Keywords : Equality Before the Law, Corruption, Military Personnel